Implementasi Pengembangan Smart Desa yang Rama Lingkungan di Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa

Sahuddin[1], Zulkieflimansyah[2], Ahmad Yamin[3]
[1,2,3]Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia
E-mail: sahuddin060565@gmail.com, zulkieflimansyah@uts.ac.id, ahmad.yamin@uts.ac.id

Article Info
Article History
Received: 2024-08-07
Revised: 2024-09-22
Published: 2024-10-07

Keywords:
Implentasi Kebijakan;
Smart Desa;
Ramah Lingkungan.

Abstract
The purpose of this study is: 1) To describe the implementation of the Smart village program in Langam village, Lopok sub-district, Sumbawa Regency; 2) To describe the implementation of the environmentally friendly village program in Langam village; 3) To describe the inhibiting factors in the implementation of the Smart village program in Langam village, Lopok sub-district, Sumbawa Regency. This study uses descriptive research with a qualitative approach, data collection techniques through interviews, observation and documentation, with key informants such as the Head of Langam village, Village Secretary, Head of Government, Head of Finance, Smart village operator, Lalumo operator and Head of hamlet. The results of the study that the implementation of the development of an environmentally friendly smart village program is in accordance with the indicators of Policy implementation according to Edward III, namely: 1) Communication, 2) Resources, 3) Disposition, 4) Bureaucratic Structure. While the inhibiting factors are regulation, network development and funding while for environmentally friendly villages are waste management, community participation, supporting factors and inhibiting support for implementing policies according to Edward and the unavailability of an adequate budget for the development of smart villages and environmental management. Thus, it can be concluded that policy implementation is very much needed for the development of smart villages and communication in waste management, community participation and stakeholder involvement to realize environmentally friendly villages.

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2024-08-07
Direvisi: 2024-09-22
Dipublikasi: 2024-10-07

Kata kunci:
Policy Implementation;
Smart Village;
Environmentally Friendly.

Abstrak
Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan implementasi program Smart desa di desa Langam kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa; 2) Untuk mendeskripsikan Implementasi program desa Rama Lingkungan di Desa Langam; 3) Untuk mendeskripsikan faktor penghambat implementasi program Smart desa di desa Langam kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan informan kunci seperti Kepala desa Langam, Sekretaris desa, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, Operator smart desa, operator silamo dan Kepala dusun. Hasil penelitian bahwa Implementasi pengembangan program smart desa yang rama lingkungan sesuai dengan indikator implementasi Kebijakan menurut Edward III yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi. Sedangkan faktor penghambat adalah regulasi, pengembangan jaringan dan pendanaan sedangkan untuk desa rama lingkungan adalah pengelolaan samapah, Partisipasi masyarakat, faktor pendukung dan penghambat dukungan untuk mengeimplentasi kebijakan menurut edwar dan belum tersedianya anggaran yang memadai untuk pengembangan samrt desa dan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sangat dibutuhkan untuk pengembangan smart desa dan komunikasi dalam pengelolaan sampah, partisipasi masyarkat dan keterlibatan stakeholder untuk merealisasikan desa yang rama lingkungan.

I. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan smart desa di Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa mengintegrasi antara program samrt desa dengan kebijakan penataan lingkungan sebagai-mana diamantkan oleh peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia menerapkan konsep nawacita yang merupakan komitmen pembangunan negara yang dimulai dari desa. Dengan dikeluarkannya peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan ber-kelanjutan, Pemerintah Indonesia menerapkan konsep nawacita yang merupakan komitmen pembangunan negara yang dimulai dari desa.

Dengan dikeluarkannya peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam proses pembangunan ini pemerintah Indonesia juga mengacu pada pengembangan SDG's (Sustainable Development Goals) yang dapat mengakomodasi masalah pembangunan secara lebih komprehensif, dengan proses yang lebih partisipatif, tidak eksklusif birokratis, dan melibatkan berbagai sektor seperti pemerintahan, lembaga swadaya pemerintah, akademisi (universitas), sektor bisnis dan swasta, serta kelompok kepentingan lainnya. Berpijak pada tiga pilar utama yaitu pembangunan manusia, sosial ekonomi, dan lingkungan, artinya SDG's merupakan suatu inisiatif untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik serta dapat bersinergi dengan lingkungan.

Masalah lingkungan hidup adalah masalah kita bersama. Lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah Negara, kawasan atau benua. Semuanya berpijak pada satu bumi yang sama, yang harus dipelihara, dan dilestarikan. Penanganannya harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh umat manusia dimuka bumi ini (Dongoran, et. al., 2018; Purba, et. al., 2017). Namun cita-cita luhur untuk mewariskan dunia ini bagi generasi yang akan datang, masih perlu terus menerus digalakkan dan diwujudkan bersama-sama. Tingginya komitmen pemerintah dalam pengolaan lingkungan hidup dapat mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanpa penyelenggaraan pemerintah yang baik sulit mengharapkan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik pula (Keraf, 2000). Mengingat permasalahan lingkungan perlu perhatian yang serius, pemerintah melalui Kementrian Negara Lingkungan Hidup merespon permasalahan lingkungan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau. Program menuju Indonesia hijau merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan konservasi Sumber Daya Alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Program ini merupakan suatu instrument pengawasan lingkungan hidup yang dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam menganalisis Peraturan Perundang-undangan Konservasi Sumber Daya Alam dan pengendalian kerusakan lingkungan di daerahnya masing-masing. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program gerakan ramah lingkungan adalah 1) penanaman pohon peneduh bisa pohon yang bersifat produktif/tanaman hias dan tanaman apotik hidup, 2) penyediaan tempat sampah, 3) pemilahan sampah dan pengelolaannya menjadi pupuk kompos.

Program gerakan ramah lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa Langam bukanlah murni program yang dicetuskan sendiri oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melainkan mengadopsi program yang telah dilaksanakan oleh kelompok masyarakat di kecamatan Lopok khususnya masyarakat yang ada di desa Langam. Kelompok masyarakat ini telah berhasil menciptakan kawasan lingkungan pemukiman yang asri dan hijau, serta melakukan pemilahan terhadap sampah rumah tangga, menyediakan tempat sampah yang tertutup serta melakukan pengelolaan sampah baik yang bisa dimanfaatkan kembali menjadi suatu produk yang baru maupun mengelola sampah menjadi pupuk kompos. Keberhasilan kelompok masyarakat desa Langam menjadikan Desa tersebut sebagai Desa percontohan penghijauan dan pengolahan sampah sejak tahun 2022. Saat ini desa Langam menjadi pilot proyek dari pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai desa yang ramah dan sadar dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan pemerintah desa telah menyediakan truk sampah untuk mengangkut sampah pasar dan sampah rumah tangga untuk dikelolah menjadi kompos untuk kebutuhan petani yang ada di desa Langam. Program desa rama lingkungan dimulai dengan Pembentukan Rukun Tetangga (RT) yang ramah lingkungan dilanjutkan dengan membentuk rukun tetangga (RT) baru yang ramah lingkungan dari tahun ke tahun, sehingga pada akhirnya dari rukun tetangga yang telah ramah lingkungan akan membentuk suatu kampung yang ramah lingkungan pula. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan implementasi program Smart desa di desa Langam kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. 2. Untuk dapat mendeskripsikan Implementasi program desa Rama Lingkungan di Desa Langam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin (2003), merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian naturalistik merupakan penelitian yang sumber datanya diperoleh dari situasi wajar (natural setting) atau tanpa adanya

manipulasi. Melalui pendekatan naturalistik, Peneliti dapat mengetahui tanggapan dan persepsi dari berbagai kalangan, seperti terhadap para aktor kebijakan pada badan dan instansi yang relevan, aparatur yang melaksanakan implenetasi pengembangan Smart Desa yang rama lingkungan di desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Program Smart Desa di desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa

a) Komunikasi

Dalam program Smart Desa juga diperlukan komunikasi transmisi yang efektif dan efisien untuk menghubungkan masyarakat di desa dengan pemerintah, penyedia layanan, dan mitra kerja lainnya. Komunikasi transmisi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti telepon pintar yang sudah terhubung dengan internet Desa Langam email, atau media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram Desa Langam Pemerintah Desa Langam sendiri dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pertanyaan "Bagaimana pemerintah Desa Langam mengtransmisikan program Smart Desa ini kepada kelompok sasaran kebijakan (masyarakat)? *"Narasumber dari pemerintah Desa yaitu Kepala Desa menjawab : "Sebelum pembuatan program Smart desa ini kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kegiatan-kegiatan Desa,di acara ataupun langsung pada saat pertemuan-pertemuan."*

Melihat jawaban dari narasumber bisa terlihat bahwa penyaluran komunikasi dalam hal transmisi dilakukan oleh pemerintah dengan cara memanfaatkan momen dalam suatu pertemuan sehingga transmisi program terjadi disaat Pemerintah Desa Langam berkomunikasi secara bertatap muka dengan sekumpulan masyarakatnya. Peneliti berpendapat bahwa cara pentransmisian program pemerintah Desa Langam akan Implementasi Smart Desa ini cukup baik, namun ada beberapa hal yang seharusnya bisa dilakukan seperti mengadakan Roadshow, Workshop ataupun Bimbingan Teknis yang semua ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan Implementasi Smart Desa ini. Kejelasan, Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street level bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/ mendua. Dalam hal Smart Desa di Desa Langam pembuat dan pelaksana kebijakan merupakan pemerintah Desa Langam itu sendiri, jadi tidak ada ambigu diantara-nya dan hal ini dibuktikan oleh peneliti dengan memberikan pertanyaan kepada pemerintah desa Kepala desa seperti:

Bagaimana koordinasi antar internal Pemerintah Desa Langam mengenai Smart Desa ini? "Narasumber dari pemerintah desa yaitu Kepala Desa menjawab : *Ya seperti yang dijawab sebelumnya, sebagai Kepala Desa saya selalu berkoordinasi dengan Operator dan Teknisi mengenai kemungkinan masalah- masalah yang terjadi terkait Smart Desa ini."*

Melihat dari jawaban Kepala Desa peneliti berpendapat bahwa kejelasan komunikasi tidak ada bias atau ambigu yang terjadi dikalangan internal pemerintah desa.

b) Sumber Daya

Dalam konteks ini peneliti telah bertanya kepada pihak implementor atau pemerintah desa dengan pertanyaan "Perihal sumberdaya, dalam hal kelengkapan sumberdaya ada tentang personal, kewenangan, keuangan dan peralatan. Menanggapi hal tersebut, apakah sejauh program ini berjalan Pemerintah Desa Langam mengalami kekurangan atau ketidak lengkapan sumberdaya?" Narasumber dari pemerintah yaitu Kepala Desa menjawab:

"Sejauh program ini berjalan kami tidak mendapatkan kekurangan atau ketidak lengkapan sumberdaya, karena di Desa Langam banyak SDM yang telah begitu paham teknologi dan kami mempekerjakan mereka sebagai staff untuk penangganan Smart Desa."

Perihal sumberdaya staff, pemerintah Desa Langam sama sekali tidak kekurangan staff, staff pengelola seperti Teknisi dan Operator cukup piawai dalam melaksanakan tugasnya maka

dari itu kegagalan yang terjadi dikarenakan kekurangan, kurang kompeten atau kurang memadai nihil adanya. Peneliti berpendapat bahwa sebuah sistem keamanan yang berbasis internetisasi pasti akan bisa diterobos oleh oknum yang ahli, masalah yang terjadi adalah Hacking. Maka dari itu peneliti berasumsi bahwa tidak ada kekurangan staff ataupun kurang kompeten staff di Desa Langam ini. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Menurut Kaur Keuangan Desa yang kami wawancara tanggal 6 Agustus 2024 menayatakan bahwa *"sumber daya manusia dikantor desa Langam sudah lumayan tersedia karena hampir 50% sudah mengenyam pendidikan S1 serta mampu mampu mengoperasional peralatan teknologi informasi baik letop maupun PC yang di sediakan oleh kepala desa Langam"*

Dari hasil wawancara dengan Kaur keuangan membuktikan bahwa desa Langam sudah terampil dalam menggunakan peralatan elektronik yang disediakan oleh kepala desa Langam ini dibuktikan dengan apa WEBSITE untuk menampilkan seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat yang ada di desa Langam.

c) Disposisi

Ada 2 (dua) variable yang menjadi perhatian terhadap disposisi ini yaitu:

1) Pengangkatan Birokrasi, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Melihat hal ini peneliti memberikan pertanyaan kepada pihak implementor kebijakan pertanyaannya berbunyi "Bagaimana PemDes merekrut Birokrat untuk menanggani program Smart Desa ini ? Apakah harus merupakan warga Desa Langam asli yang kompeten atau bisa orang luar Langam namun tidak kalah kompetennya?" Narasumber dari pemerintah yaitu Kepala Desa menjawab :*"Ya,kami memperdayakan SDM yang ada di Desa Langam karena SDM di Desa kami tidak kalah berkompeten dengan yang diluar sana."*

Peneliti berpendapat bahwa merupakan hal yang bagus merekrut staff yang berasal dari desa-nya sendiri karena ada perasaan cinta untuk meningkatkan pengembangan desa-nya ketimbang staff dari luar desa yang bekerja hanya untuk mendapatkan insentif.

2) Insentif, insentif pada dasarnya dilakukan untuk mengapresiasi kinerja dan memberikan dukungan personal kepada pelaksana agar menjadi factor pendorong untuk melaksanakan kinerja lebih baik. Ada pertanyaan yang peneliti utarakan kepada implementor kebijakan (pemerintah) mengenai hal ini yang berbunyi "Bagaimana penganggaran Smart Desa ini?" Narasumber dari pemerintah yaitu Kepala Desa menjawab: *"Anggaran untuk Smart Desa itu termuat dalam APBDes dikarenakan pembuatan Smart Desa ini berkelanjutan atau Suistanable karena anggaran untuk Smart Desa ini terbatas setiap tahun, ada anggaran yang harus kami anggarkan untuk pengembangan kemudian pembayaran sistem pendukung seperti staff yang menanggani Smart Desa ini, pembayaran internet dan website/hosting yang harus terus dimaintenance."*

Pemerintah Desa Langam dalam penganggaran Smart Desa juga didalamnya ada anggaran untuk pembayaran kepada staff pendukung operasional Smart Desa seperti Teknisi Smart Desa dan Operator Smart Desa di Desa Langam. Insentifitas menjadi hal krusial dikarenakan pengerak Smart Desa merupakan kedua jenis staff ini, kedua posisi ini saling terkait dan bergantung satu sama lain untuk keberhasilan program Smart Desa.

Teknisi bertanggung jawab memastikan infrastruktur TIK berjalan dengan baik, sementara operator bertanggung jawab memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital dengan mudah dan nyaman.

Apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Langam lebih Lanjut disampaikan oleh Kaur Keuangan Desa Langam berdasarkan hasil wawancara tanggal 6 Agustus bahwa *:"Kebijakan samrt desa yang ditetapkan oleh Pak Kades akan kami tindaklanjuti ketika smart desa ini sudah diserahkan kepada desa oleh pemerintah atasan, maka kami di bagian keuangan akan menganggarkan keberlansungan smart desa ini dengan mempermanenkan operator khusus yang menangani smart desa karena perencanaan pembangunan desa akan kami masukkan dalam standar pengelolaan laporan keuangan desa yang ada dalam SISKUDES sebagai dijadikan dalam gambar :*

Dari apa yang disampaikan oleh Kaur keuangan sekaligus Opratur SISKUDES jelas menggambarkan bahwa fitur pelaporan keuangan sudah dapat dioperasionalkan oleh Operator SISKUDES untuk melaksanakan E-Lapor kepada pemerintah atasan baik untuk dievaluasi oleh Camat maupun Dinas yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya pemerinatahn Desa. Selanjutnya wawancara kami dengan masyarakat yang menrima pelayanan dari Smart Desa hasil wancara tanggal 7 Agsutus 2024 menyatakan: *"Kami senang dan berterima kasih kepada Pak Kades yang telah menyediakan layanan smart desa karena dengan keberadaan program smart desa kami dapat memasarkan jualan kami melalui aplikasi dengan menggunakan jaringan internet dari kantor desa. Namun harapan kami ke depan desa dapat menyediakan internet gratis untuk masyarakat yang ada di desa Langam".*

Dari hasil wancara tersebut ternya masyarakat sangat membutuhkan layanan internet gratis untuk memasarkan produk dagangan mereka yang selama ini mereka berdahgang keluar masuk kampung, dengan keberadaan internet gratis masyarakat dapat terbantu untuk marketing produk secara online.

d) Struktur Birokrasi

Standard Operational Procedure (SOP), dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Ada pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada implementor kebijakan (pemerintah) dalam hal SOP ini "Dalam hal prosedur kerja bagaimana prosedur kerja PemDes dalam pengimplementasian program Smart Desa ini ?

Narasumber dari pemerintah yaitu Kepala Desa menjawab: *"Secara SOP tidaktertuang secara tertulis,dalam menjalani Smart Desa ini pun PemDes mempunyai Operator dan Teknisi sebagai pihak yang membantu implementasi Smart Desa. Tugas-tugas dari seorang Operator dan Teknisi tidak tertulis secara harafiah namun mereka telah tahu hal-hal apa yang menjadi tugas mereka, seperti contohnya seorang Operator itu menanggani hal-hal dibelakang layar semacam adanya gangguan dalam website desa, adanya hacking di server,peng-maintenance akan website desa dll. Sedangkan tugas dari seorang Teknisi itu adalah langsung terjun ke lapangan, yang dalam artian jika ada masalah di sarana internet Wi-Fi atau CCTV bermasalah maka tugas Teknisi untuk mengsolusikan masalahnya".*

Ada pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada Teknisi dan Operator Smart Desa perihal fragmentasi ini "Bagaimana prosedur kerja seorang teknisi dan operator yang menanggani program Smart Desa ini?" Narasumber dari Pemerintah Desa yaitu Teknisi dan Operator menjawab: *"Kami sebagai*

seorang Teknisi dan Operator Smart Desa di Desa Langam memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Seperti saya seorang Teknisi mempunyai tugas utama merancang, membangun, mengoperasi-kan, serta memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diperlukan untuk pelak-sanaan program Smart Desa. Sedangkan untuk teman saya Operator Smart Desa mempunyai tugas utama memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menggunakan aplikasi dan layanan digital yang disediakan oleh program Smart Desa".

Dalam hasil wawancara ini, peneliti melihat bahwa dengan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada para staff, staff telah paham akan apa yang menjadi tugas dan fungsinya maka proses implementasi sejauh ini berjalan mulus. Selanjutnya operator SISKUDES menyatakan bahwa: *"Tugas kami sebagai operator SISKUDES memastikan bahwa laporan yang disampaikan dapat berlangsung secara baik lewat aplikasi E-Lapor dalam format SISKUDES yang meliputi ketersediaan neraca yang menyangkut usulan kegiatan dan program serta kebutuhan penganggaran yang di alokasikan dalam APBDes harus dapat terlapor secara Online kepada pemerintahan atasan yaitu Camat dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa".* Adapun contoh kerja aplikasi siskudes adalah sebagai berikut :

Selanjutnya wawancara dengan Sekdes Langam sekaligus operator webside desa terkait dengan struktur Birokrasi pada tanggal 8 Agustus 2024 menayatakan bahwa: *"Setelah Program Smart Desa yang dari pemerintaha Pusat di serahkan ke desa maka kami aparatur desa Langan membuat regulasi dalam bentuk Perdes atau Perkades yang menyangkut pelayanan Smart Desa setelah itu baru kami akan membuat standar-sandar pelayanan sebagai turunan dari peraturan kebijakan dari pemerintah atasan".*

2. Implementasi program desa Rama Lingkungan di Desa Langam

Beberapa tahapan kebijakan pemerin-tahan desa untuk melaksanakanprogram desa ramah lingkungan yaitu:

a) Pengolahan Sampah

Untuk sementara ini pengolahan sampah rumah tangga di desa Langam dilakukan pemilahan antara samah organik dan samapah anorganik, untuk kemudian di tampung dalam satu tempat yang kemudian untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut: Menurut Kepala dusun Langam hasil wawancara tanggal 8 Agsutus 2024 menyatakan:

"Kami sebagai kepala Dusun di Langam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan RT dan RW yang ada di lingkungan Dusun Langam agar setiap rumah melakukan pemilihan sampah dari sisa makanan dan minuman serta sampah plastik untuk pemudahkan pada saat melakukan pemrosesan sampah lebih lanjut untuk dijadikan pupuk atau pakan ternak." Selanjutnya wawancara dengan kepala dusun Kabuyit tanggal 9 Agsutus 2024 menyatakan:

"Kami sangat bersyukur pak Kades dapat menyediakan DAM Truk untuk mengangkut sampah warga dari RT/RW di wilayah dusun Kabuyit. Dengan keberadaan DAM truk ini kami sampah tidak lagi menumpuk dan kebersihan lingkungan dapat diatasi secara bersama".

b) Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka menjadikan desa langam sebagai desa yang rama lingkungan maka sangat diperlukan partisipasi masyarakat. Sebagaimana pernyataan kades Langam :

"Untuk memberikan penyadaran masyarakat akan pentingnya keber-sihan lingkungan maka sosialisasi program kebersihan lingkungan perlu teus digalakkan. Saya selalu menye-ruhkan kepada masyarakat dalam siap acara kemasyarakat baik pada acara

resepsi perkawinan, khitanan dan acara kemasyarakat lainnya agar kita menjadi kebersihan lingkungan" .

Dari apa yang disampaikan oleh kepala desa dapat dijelaskan bahwa komunikasikan kebijakan sangat penting kepada masyarakat karena berhasil atau tidaknya itu sendiri. Sementara sosialisasi kebijakan hanya fokus pada pemberitahuan kepada suatu kebijakan sangat tergantung kepada cara mengkomunikasikan suatu kebijakan. Mengomunikasikan kebijakan untuk publik lebih penting dari sekadar menyosialisasikan kebijakan tersebut. Komunikasi kebijakan berarti melibatkan publik sejak dari penyusunan kebijakan publik tanpa ada keterlibatan dalam proses penyusunan kebijakan. suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Selanjutnya, George C. Edward sebagaimana dikutip Subarsono (2011) mengatakan ada tiga indikator penentu keberhasilan pada variabel komunikasi didalam implementasi kebijakan, yaitu: Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu: 1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. 2. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. 3. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

c) Pelibatan Stakeholder

Pelibatan stakeholder dalam program rama lingkungan sangatlah diperlukan teruma dengan dinas instansi terkait dalam ini Dinas Lingkungan Hidup dan dinas pemberdayaan masyarakat desa ini terbukti dengan kemampuan dari pemerintah desa dengan pengadaan DAM Truk untuk sampah desa yang dibiayai melalui APBDes.

B. Pembahasan

1. Implementasi program Smart desa di desa Langam kecamatan Lopok

Implementasi program smar desa di Desa Langam kecamatan Lopok di pengaruhi oleh oleh model implementasi kebijakan model Grindle. Model Grindle terletak pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerimaan implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.

a) Model Elmore dkk.

Model keenam adalah model yang dikembangkan oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, dan Benny Hjern dan David O'Porter. Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk dapat mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran rendah. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

b) Model Edward

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah lack of attention to implementation. Dikatakannya, bahwa without effective implementation the decission of policymakers will not be carried out successfully. Empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resources, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.*Resources* berkenaan

dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, di mana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.*Disposition* berkenaan dengan kesediaan daripada implementor untuk *carry out* kebijakan tersebut.Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

2. Implementasi program desa Rama Lingkungan di Desa Langam

Implementasi program Rama Lingkungan di desa Langam dilakukan dengan pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sudah selayaknya pengelolaan sampah mengadopsi strategi berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) dan berbasis masyarakat, pengelolaan sampah secara terpadu dengan menerapkan pengelolaan mulai dari sumbernya, sesuai dengan Modul Pengelolaan Sampah Berbasis 3R. Pemahaman 3R merupakan langkah untuk mengurangi sampah, yang meliputi tindakan menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengurangi (reduce) sampah (recycle).

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan yang terdiri dari operasi pengurangan dan penanganan, menurut UU No. 18 Tahun 2008 Bab I, Pasal 1, Ayat 3. Pengurangan sampah adalah proses mengumpulkan, memilah, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah secara lokasi agar dapat diangkut dan diproses di TPA.

Pendekatan 3R yang merupakan singkatan dari Reduce, Reuse, dan Recycle digunakan oleh salah satunya.

a) Reduce (pengurangan sampah)

Reduce adalah kegiatan reduksi timbulan sampah di sumber. Reduksi dapat mengurangi toksisitas dari sampah yang ditimbulkan (Tchobanoglous et al., 1993).

b) Reuse (penggunaan kembali)

Reuse adalah upaya reduksi timbulan sampah dengan menggunakan kembali barang yang kemungkinan masih bisa terpakai sehingga tidak begitu saja menjadi sampah (Arisona, 2018).

c) Recycle (daur ulang sampah).

Daur ulang limbah melibatkan konversi bahan limbah menjadi bentuk alternatif yang, setelah diproses, memiliki nilai ekonomi. Daur ulang adalah komponen penting dari strategi pengurangan sampah TPA, yang dimulai dengan pengumpulan sumber sampah (Stiawan, 2018).

Untuk menunjang Gerakan 3R maka sangat diperlukan partisipasi Masyarakat untuk mendukung program pemerintah desa. suatu kebijakan sangat tergantung kepada cara mengkomunikasikan suatu kebijakan.Mengomunikasikan kebijakan untuk publik lebih penting dari sekadar menyosialisasikan kebijakan tersebut. Komunikasi kebijakan berarti melibatkan publik sejak dari penyusunan kebijakan publik tanpa ada keterlibatan dalam proses penyusunan kebijakan. suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Selanjutnya, George C. Edward sebagaimana dikutip Subarsono (2011) mengatakan ada tiga indikator penentu keberhasilan pada variabel komunikasi didalam implementasi kebijakan, yaitu: Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu: 1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapatmenghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. 2. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. 3. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Implementasi kebijakan program Smart Desa di desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa sangat dipengaruhi sesuai dengan teori Edwar III yaitu :

Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan struktur Birokrasi.

2. Program desa ramah lingkungan di Desa Langam telah berjalan dengana baik yang dibuktikan dengan terpenuhinya indikator yaitu: a) pengelolaan sampah yang didukung oleh pemerintah desa, b) partisipasi masyarakat dan c) kerjasama stake holder.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implementasi Pengembangan Smart Desa yang Rama Lingkungan di Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR RUJUKAN

A., Effendi, K. C., Novianto, A., Sumiar, H. R., Angendari, D. A. D., & Putri, B. P. (2019). *DESA CERDAS: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0*. (E. A. Purwanto & D. Permady, Eds.). Yogyakarta: Center for Digital Society.

Abdul Wahab, Solichin. (2010). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*

Agustino, L. (2006). *Politik dan Kebijakan publik*. AIPI Bandung.

Agustino, Leo. (2006). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: AlfaBeta.

Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasinya*.

Andi Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.

Anggini, T., & Rachmawati, R. (2016). *Pemanfaatan Media Center Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Surabaya Smart* City. *Jurnal Bumi Indonesia*.

Ardyatmoko, L., Yusuf, M., & Stiawati, T. (2014). *Implementasi Program Gerakan 1000 Bank*

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bandung: AlfaBeta.

.Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional

Edward, G. C. (1984). *Public policy implementation*. JAI Press. Islamy, M. I. (2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara,* Jakarta: PT. *Bumi Aksara*.

Eka Maria Ulfa. (2016). *Pelaksanaan Program Broadband Learning Center (BLC) Oleh Dinas Kominfo Pemkot Surabaya Untuk Mewujudkan Surabaya Cyber City Pendahuluan Di era keterbukaan informasi publik yang telah menjadi kebutuhan utama masyarakat , pemerintah semakin dituntut untuk*. *2*(1), 29–55.

Fitri, R., Asyikin, A. N., & Nugroho, A. S. B. (2017). *Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk Menuju Tata Kelola Desa yang Baik (Good Governance) Berbasis T*IK. *Jurnal Positif*, *3*(2), 99–105.

Gava Media. Keraf, A. S. (2000). Pustaka Filsafat ETIKA BISNIS, Tuntunan dan Relevansinya. Kanisius.

H. R. Sekar, A. Anggorosesar, E. A. Maranny, I. Julwendy, T. Rachmadhani, & R. Wijaya, Eds.. Jakarta: Puslitbang Sumber Daya, Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika,

Hadjar, Ibnu. (1999) *Dasar Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta:

Hidayatulloh, S., & Teknik, F. (2016). *Internet of things bandung smart city*. *3*(September), 164–175.